



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2016 Nomor PHD-260/PK/2016 tanggal 24 November 2016, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat Dana penganggaran penerimaan hibah pada Lain-lain Pendapatan serta penggunaan hibah sebagai Belanja dalam APBD;
- b. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 22B/LHP/XVIII.YOG./05/2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern tanggal 30 Mei 2016, terjadi potensi kesalahan berulang atas pengakuan Utang Jangka pendek Lainnya pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan piutang bagi hasil pendapatan pada kabupaten/kota yang disebabkan Kepala bidang pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset tidak memasukkan nilai bagi hasil terutang dan memprosesnya dalam konteks Surat Keputusan

Gubernur atas Alokasi Definitif Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah;

- c. bahwa sesuai surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-3 /PK/2016 hal Realisasi Penyetoran Pajak Rokok Kurang Setor TA 2015 tanggal 1 November 2016;
- d. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok pada Pasal 21 ayat (2), maka pajak rokok harus segera disalurkan ke RKUD Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya pajak rokok di RKUD provinsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 62);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 47);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 3.973.817.207.029,60 bertambah sejumlah Rp. 66.031.523.856,00 sehingga menjadi Rp. 4.039.848.730.885,60 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	3.839.634.779.011,80
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>66.031.523.856,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	3.905.666.302.867,80

2. Belanja

a. Semula	Rp.	3.973.817.207.029,60
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>66.031.523.856,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	<u>4.039.848.730.885,60</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	<u>(134.182.428.017,80)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	364.682.428.017,80
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	364.682.428.017,80
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	230.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>230.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	<u>134.182.428.017,80</u>

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Lampiran II pada Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, PPKD/BUD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan	3.839.634.779.011,80	3.905.666.302.867,80	66.031.523.856,00	0,02
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.577.467.434.715,80	1.643.358.958.571,80	65.891.523.856,00	0,04
1.1.1.	Pajak Daerah	1.358.294.956.066,00	1.424.186.479.922,00	65.891.523.856,00	0,05
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	37.637.651.033,00	37.637.651.033,00	0,00	0,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	57.368.821.720,85	57.368.821.720,85	0,00	0,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	124.166.005.895,95	124.166.005.895,95	0,00	0,00
1.2.	Dana Perimbangan	1.732.575.255.000,00	1.732.575.255.000,00	0,00	0,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	123.533.815.000,00	123.533.815.000,00	0,00	0,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	940.835.434.000,00	940.835.434.000,00	0,00	0,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	668.206.006.000,00	668.206.006.000,00	0,00	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	529.592.089.296,00	529.732.089.296,00	140.000.000,00	0,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	10.794.617.600,00	10.934.617.600,00	140.000.000,00	0,01
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	518.205.064.166,00	518.205.064.166,00	0,00	0,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	592.407.530,00	592.407.530,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.839.634.779.011,80	3.905.666.302.867,80	66.031.523.856,00	0,02
2.	Belanja	3.973.817.207.029,60	4.039.848.730.885,60	66.031.523.856,00	0,02
2.1.	Belanja Tidak Langsung	2.011.901.031.250,60	2.077.792.555.106,60	65.891.523.856,00	0,03
2.1.1.	Belanja Pegawai	584.496.389.843,37	586.441.600.516,37	1.945.210.673,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	739.110.270.983,00	739.110.270.983,00	0,00	0,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.683.000.000,00	2.683.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	586.843.430.146,50	611.852.157.746,18	25.008.727.599,68	0,04
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	87.863.277.816,00	87.863.277.816,00	0,00	0,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.904.662.461,73	49.842.248.045,05	38.937.585.583,32	0,78
2.2.	Belanja Langsung	1.961.916.175.779,00	1.962.056.175.779,00	140.000.000,00	0,00
2.2.1.	Belanja Pegawai	144.617.941.677,00	144.668.401.677,00	50.460.000,00	0,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	954.681.600.045,00	954.771.140.045,00	89.540.000,00	0,00
2.2.3.	Belanja Modal	862.616.634.057,00	862.616.634.057,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.973.817.207.029,60	4.039.848.730.885,60	66.031.523.856,00	0,02
	SURPLUS/(DEFISIT)	-134.182.428.017,80	-134.182.428.017,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
3.	Pembiayaan	134.182.428.017,80	134.182.428.017,80	0,00	0,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	364.682.428.017,80	364.682.428.017,80	0,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	364.682.428.017,80	364.682.428.017,80	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	364.682.428.017,80	364.682.428.017,80	0,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	230.500.000.000,00	230.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	230.500.000.000,00	230.500.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	230.500.000.000,00	230.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	134.182.428.017,80	134.182.428.017,80	0,00	0,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd

Dewo Isnu Broto IS
NIP 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 81 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4.	PENDAPATAN	1.494.758.603.232,80	1.560.650.127.088,80	65.891.523.856,00	0,04	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.494.758.603.232,80	1.560.650.127.088,80	65.891.523.856,00	0,04	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	1.358.294.956.066,00	1.424.186.479.922,00	65.891.523.856,00	0,05	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor	590.500.000.000,00	593.636.819.176,00	3.136.819.176,00	0,01	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	278.544.951.500,00	290.975.043.211,00	12.430.091.711,00	0,04	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 290.975.043.211
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.02.	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	823.677.600,00	849.194.400,00	25.516.800,00	0,03	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 849.194.400
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.03.	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.458.716.700,00	1.669.543.800,00	210.827.100,00	0,13	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 1.669.543.800
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.04.	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	2.591.006.900,00	2.686.580.200,00	95.573.300,00	0,04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 2.686.580.200
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.05.	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	54.318.802.500,00	56.467.017.600,00	2.148.215.100,00	0,04	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 56.467.017.600
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.06.	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	6.516.338.700,00	6.987.470.400,00	471.131.700,00	0,07	C-2 Truck, Pick Up (Umum) 6.987.470.400
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.07.	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	7.663.500,00	7.719.000,00	55.500,00	0,01	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 7.719.000
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.09.	E Sepeda Motor	243.451.793.500,00	231.137.574.865,00	-12.314.218.635,00	-0,05	E Sepeda Motor 231.137.574.865
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.11.	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1.765.854.500,00	1.788.071.100,00	22.216.600,00	0,01	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas) 1.788.071.100
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.12.	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	173.443.200,00	189.064.000,00	15.620.800,00	0,08	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) 189.064.000
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.13.	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	449.750.200,00	473.220.100,00	23.469.900,00	0,05	C-3 Truck, Pick Up (Dinas) 473.220.100
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.15.	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	398.001.200,00	406.320.500,00	8.319.300,00	0,02	E-3 Sepeda Motor (Dinas) 406.320.500
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	372.491.741.000,00	420.260.086.022,00	47.768.345.022,00	0,11	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	191.498.439.900,00	219.129.275.919,00	27.630.836.019,00	0,13	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 219.129.275.919
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.02.	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	206.191.000,00	493.741.000,00	287.550.000,00	0,58	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 493.741.000
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.03.	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.936.269.000,00	2.406.199.000,00	469.930.000,00	0,20	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 2.406.199.000
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.04.	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	2.702.677.000,00	2.961.992.200,00	259.315.200,00	0,09	B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 2.961.992.200
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.05.	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	27.841.611.000,00	33.701.756.300,00	5.860.145.300,00	0,17	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 33.701.756.300
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.06.	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	4.982.032.400,00	5.093.454.100,00	111.421.700,00	0,02	C-2 Truck, Pick Up (Umum) 5.093.454.100

1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.07.	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	950.000,00	2.027.000,00	1.077.000,00	0,53	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	2.027.000
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.09.	E Sepeda Motor	139.145.059.700,00	148.396.716.503,00	9.251.656.803,00	0,06	E Sepeda Motor	148.396.716.503
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.11.	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	2.572.547.000,00	4.872.597.000,00	2.300.050.000,00	0,47	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	4.872.597.000
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.12.	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	257.269.000,00	523.789.000,00	266.520.000,00	0,51	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	523.789.000
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.13.	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	737.292.000,00	1.832.732.000,00	1.095.440.000,00	0,60	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	1.832.732.000
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.15.	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	611.403.000,00	845.806.000,00	234.403.000,00	0,28	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	845.806.000
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	206.503.948.066,00	220.426.316.160,00	13.922.368.094,00	0,06		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.01.	Premium	145.776.480.409,40	131.282.566.750,00	-14.493.913.659,40	-0,11	Premium	131.282.566.750
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.02.	Pertamax	20.613.939.154,00	30.278.131.357,00	9.664.192.203,00	0,32	Pertamax	30.278.131.357
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.03.	Pertamax Plus	281.034.684,00	285.530.443,00	4.495.759,00	0,02	Pertamax Plus	285.530.443
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.04.	Solar	22.657.447.746,50	4.031.750.627,00	-18.625.697.119,50	-4,62	Solar	4.031.750.627
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.05.	Gas	0,00	5.020.506,00	5.020.506,00	1,00	Gas	5.020.506
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.06.	Pertamina Dex	490.005.001,10	769.469.889,00	279.464.887,90	0,36	Pertamina Dex	769.469.889
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.07.	Bio Solar	15.200.833.107,00	28.789.238.341,00	13.588.405.234,00	0,47	Bio Solar	28.789.238.341
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.08.	Pertalite	1.484.207.964,00	24.813.425.625,00	23.329.217.661,00	0,94	Pertalite	24.813.425.625
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.09.	Dexlite	0,00	143.634.792,00	143.634.792,00	1,00	Dexlite	143.634.792
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.11.	Pertamax Turbo	0,00	27.547.830,00	27.547.830,00	1,00	Pertamax Turbo	27.547.830
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.06.	Pajak Air Permukaan	218.000.000,00	230.823.500,00	12.823.500,00	0,06		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.06.01.	Pajak Air Permukaan	218.000.000,00	230.823.500,00	12.823.500,00	0,06	Pajak Air Permukaan	230.823.500
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07.	Pajak Rokok	188.581.267.000,00	189.632.435.064,00	1.051.168.064,00	0,01		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07.01.	Pajak Rokok.	188.581.267.000,00	189.632.435.064,00	1.051.168.064,00	0,01	Pajak Rokok.	189.632.435.064,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.921.386.950,00	5.921.386.950,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5.921.386.950,00	5.921.386.950,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	57.368.821.720,85	57.368.821.720,85	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Persh Milik Daerah/ B U M D	53.660.921.299,98	53.660.921.299,98	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.03.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	221.396.254,00	221.396.254,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.04.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank	3.486.504.166,87	3.486.504.166,87	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	73.173.438.495,95	73.173.438.495,95	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.415.020.000,00	1.415.020.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	7.190.000.000,00	7.190.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	41.181.060.700,00	41.181.060.700,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.16.	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	323.259.795,95	323.259.795,95	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.19.	Tindak Lanjut Hasil Temuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	31.148.000,00	31.148.000,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pendapatan	1.494.758.603.232,80	1.560.650.127.088,80	65.891.523.856,00	0,04		

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.	BELANJA	146.660.713.006,00	148.605.923.679,00	1.945.210.673,00	0,01	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	64.453.366.087,00	66.398.576.760,00	1.945.210.673,00	0,03	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	64.453.366.087,00	66.398.576.760,00	1.945.210.673,00	0,03	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	29.184.313.806,00	29.184.313.806,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.	Biaya Insentif Pajak Daerah	35.091.410.672,00	37.036.621.345,00	1.945.210.673,00	0,05	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.02.	Biaya Insentif Pajak Daerah.	35.091.410.672,00	37.036.621.345,00	1.945.210.673,00	0,05	Biaya Insentif Pajak Daerah. 37.036.621.345
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Retribusi Daerah	177.641.609,00	177.641.609,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	82.207.346.919,00	82.207.346.919,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
: 1.20.09. - P P K D / B U D

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.00.00.4.	PENDAPATAN	2.262.167.344.296,00	2.262.307.344.296,00	140.000.000,00	0,01	
1.20.1.20.09.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	1.732.575.255.000,00	1.732.575.255.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	529.592.089.296,00	529.732.089.296,00	140.000.000,00	0,03	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	10.794.617.600,00	10.934.617.600,00	140.000.000,00	1,30	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.01.	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.01.01.	Rupiah Murni	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Rupiah Murni 140.000.000,00
						Hibah dari BNPB untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1 x 140.000.000,00 140.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.03.	Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	8.515.100.000,00	8.515.100.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.05.	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	2.279.517.600,00	2.279.517.600,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	518.205.064.166,00	518.205.064.166,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	592.407.530,00	592.407.530,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	2.262.307.344.296,00	2.262.307.344.296,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.	BELANJA	1.427.404.641.407,23	1.491.350.954.590,23	63.946.313.183,00	4,48	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.427.404.641.407,23	1.491.350.954.590,23	63.946.313.183,00	4,48	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	739.110.270.983,00	739.110.270.983,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.683.000.000,00	2.683.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	586.843.430.146,50	611.852.157.746,18	25.008.727.599,68	4,26	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	586.843.430.146,50	611.852.157.746,18	25.008.727.599,68	4,26	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	104.809.700.183,40	108.491.619.004,57	3.681.918.821,17	3,51	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta 108.491.619.004,57
						PKB Kota Yogyakarta 1 x 37.220.556.874,02 37.220.556.874,02
						BBNKB Kota Yogyakarta 1 x 25.754.664.100,00 25.754.664.100,00
						PBB-KB kota Yogyakarta 1 x 25.489.450.368,70 25.489.450.368,70
						P-AP Kota Yogyakarta 1 x 9.550.763,85 9.550.763,85
						Pajak Rokok Kota Yogyakarta 1 x 20.017.396.898,00 20.017.396.898,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	130.960.056.727,94	137.137.204.944,77	6.177.148.216,83	4,72	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul 137.137.204.944,77
						PKB Kabupaten Bantul 1 x 38.569.319.400,00 38.569.319.400,00
						BBNKB Kabupaten Bantul 1 x 26.597.623.900,00 26.597.623.900,00
						PBB-KB Kabupaten Bantul 1 x 36.566.004.808,35 36.566.004.808,35
						P-AP Kabupaten Bantul 1 x 15.661.763,85 15.661.763,85
						Pajak Rokok Kabupaten Bantul 1 x 35.388.595.072,57 35.388.595.072,57
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	72.744.291.686,43	76.355.540.217,31	3.611.248.530,88	4,96	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo 76.355.540.217,31

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	81.979.473.128,23	84.826.454.023,47	2.846.980.895,24	3,47	PKB Kabupaten Kulon Progo 1 x 19.227.832.286,80 19.227.832.286,80 BBNKB Kabupaten Kulon Progo 1 x 13.794.234.700,00 13.794.234.700,00 PBB-KB Kabupaten Kulon Progo 1 x 23.294.766.246,98 23.294.766.246,98 P-AP Kabupaten Kulon Progo 1 x 41.548.663,85 41.548.663,85 Pajak Rokok Kabupaten Kulon Progo 1 x 19.997.158.319,68 19.997.158.319,68 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul 84.826.454.023,47
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	196.349.908.420,50	205.041.339.556,06	8.691.431.135,56	4,43	PKB Kabupaten Gunungkidul 1 x 20.493.604.418,60 20.493.604.418,60 BBNKB Kabupaten Gunungkidul 1 x 13.331.615.600,00 13.331.615.600,00 PBB-KB Kabupaten Gunungkidul 1 x 22.532.318.748,35 22.532.318.748,35 P-AP Kabupaten Gunungkidul 1 x 82.867.342,10 82.867.342,10 Pajak Rokok Kabupaten Gunungkidul 1 x 28.386.047.914,42 28.386.047.914,42 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman 205.041.339.556,06
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	87.863.277.816,00	87.863.277.816,00	0,00	0,00	PKB Kabupaten Sleman 1 x 64.305.698.902,14 64.305.698.902,14 BBNKB Kabupaten Sleman 1 x 45.121.449.000,00 45.121.449.000,00 PBB-KB Kabupaten Sleman 1 x 54.832.584.800,24 54.832.584.800,24 P-AP Kabupaten Sleman 1 x 9.550.763,85 9.550.763,85 Pajak Rokok Kabupaten Sleman 1 x 40.772.056.089,83 40.772.056.089,83
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.904.662.461,73	49.842.248.045,05	38.937.585.583,32	357,07	
1.20.1.20.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.494.565.343.284,23	1.494.565.343.284,23	0,00	0,00	
	Surplus/(Defisit)	834.762.702.888,77	770.956.389.705,77	-63.806.313.183,00	-7,64	
6.	Pembiayaan	134.182.428.017,80	134.182.428.017,80	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	364.682.428.017,80	364.682.428.017,80	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	364.682.428.017,80	364.682.428.017,80	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	230.500.000.000,00	230.500.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	230.500.000.000,00	230.500.000.000,00	0,00	0,00	
	Pembiayaan neto	134.182.428.017,80	134.182.428.017,80	0,00	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	968.945.130.906,57	905.138.817.723,57	-63.806.313.183,00	-6,59	

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.10.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.	BELANJA	18.377.273.136,00	18.517.273.136,00	140.000.000,00	0,76	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.071.785.266,00	3.071.785.266,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.305.487.870,00	15.445.487.870,00	140.000.000,00	0,91	
1.20.1.20.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.587.067.780,00	1.587.067.780,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.329.879.900,00	1.329.879.900,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	124.184.000,00	124.184.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	160.300.000,00	160.300.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.45.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA	5.770.874.400,00	5.770.874.400,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.45.005.	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BAGI MASYARAKAT	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.10.46.	PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	3.587.357.790,00	3.587.357.790,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.51.	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	2.745.824.000,00	2.885.824.000,00	140.000.000,00	5,10	
1.20.1.20.10.51.001.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SOSIAL PASCA BENCANA	168.700.000,00	168.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.10.51.002.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI LINGKUNGAN PASCA BENCANA	462.114.000,00	462.114.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.10.51.003.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI EKONOMI PASCA BENCANA	201.823.000,00	201.823.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.10.51.004.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA	1.288.527.000,00	1.428.527.000,00	140.000.000,00	10,87	Sumber Dana: PR-Kep Dirjen PK No 72/PK/2015; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.10.51.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	163.900.000,00	214.360.000,00	50.460.000,00	30,79	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	113.900.000,00	158.360.000,00	44.460.000,00	39,03	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	107.200.000,00	151.660.000,00	44.460.000,00	41,47	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 151.660.000,00
1.20.1.20.10.51.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.10.51.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	56.000.000,00	6.000.000,00	12,00	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	50.000.000,00	56.000.000,00	6.000.000,00	12,00	Honorarium Harian Non PNS 56.000.000,00
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.124.627.000,00	1.214.167.000,00	89.540.000,00	7,96	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.635.100,00	14.566.700,00	5.931.600,00	68,69	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.635.100,00	14.566.700,00	5.931.600,00	68,69	Belanja Alat Tulis Kantor 14.566.700,00
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	242.160.000,00	242.160.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	242.160.000,00	242.160.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.700.000,00	16.068.400,00	3.368.400,00	26,52	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.700.000,00	16.068.400,00	3.368.400,00	26,52	Belanja Penggandaan 16.068.400,00
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.160.000,00	81.160.000,00	4.000.000,00	5,18	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.160.000,00	77.160.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.000.000,00
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.050.000,00	191.290.000,00	76.240.000,00	66,27	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.050.000,00	138.090.000,00	23.040.000,00	20,03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 138.090.000,00
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.200.000,00
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	520.970.000,00	520.970.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.20.24.	Belanja Perbaikan Tanggul	520.970.000,00	520.970.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	128.901.900,00	128.901.900,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	63.590.000,00	63.590.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan/Pendampingan	15.311.900,00	15.311.900,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.35.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.35.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.10.51.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.10.51.005.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA	624.660.000,00	624.660.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
	Jumlah Belanja	18.377.273.136,00	18.377.273.136,00	0,00	0,00	
	Surplus/(Defisit)	-18.377.273.136,00	-18.517.273.136,00	-140.000.000,00	0,76	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001